

BAB III

LGBT DAN *SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY (SOGI)*

Pada tahun 1948 spektrum orientasi seksual pertama kali dikembangkan oleh Alfred Kinsey. Orientasi atau kecenderungan seksual telah membentuk kelompok tertentu dan teridentifikasi dalam masyarakat. Kelompok orientasi seksual telah menjadi fenomena baru di masyarakat. Pada umumnya seseorang tidak dapat dilihat orientasi seksualnya hanya dengan penampilan. Orientasi seksual tidak dapat ditentukan dari ciri-ciri fisik, misalnya, tegap, atletis, cantik, tampan. Salah satu kelompok dengan orientasi seksual tersebut adalah LGBT.

A. Sejarah dan Perkembangan LGBT

Sejarah homoseksual sudah ada sejak zaman Mesir Kuno. Sekitar tahun 1860-an, kata yang paling mendekati orientasi seksual selain heteroseksual adalah istilah “*third gender*”. LGBT atau *Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender* merupakan sebuah istilah yang mulai tercatat pada tahun 90-an. Pada tahun 60-an, sebelum masa “Revolusi Seksual” tidak ada istilah khusus untuk menyebut homoseksual. Revolusi seksual merupakan istilah untuk menggambarkan perubahan sosial politik pada tahun 1960-1970 mengenai seks.¹

Globalisasi membawa arus LGBT ke setiap penjuru negara. Mulai dari kebudayaan *freelove*, yaitu jutaan kaum muda yang menganut gaya hidup *hippie*. Gaya hidup *hippie* merupakan sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1960-an.² Mereka menyukai aliran musik yang cenderung ke *psychedelic rock*. Tak jarang mereka juga menggunakan narkoba dan ganja untuk

¹ Sinyo. *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

² *Ibid.*

merangsang imajinasinya. Mereka juga menyerukan cinta dan keagungan seks sebagai bagian hidup yang alami. Para *hippie* percaya bahwa seks adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak seharusnya dilarang dan mendapatkan diskriminasi.

Lesbian merupakan istilah yang umum digunakan untuk para perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, atau perempuan yang mencintai perempuan baik itu secara fisik, seksual, atau emosional. Gay atau Homo adalah istilah untuk laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual kepada sesama pria, atau pria yang mencintai pria baik secara fisik, seksual, atau emosional. Kemudian biseksual adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang mempunyai ketertarikan pada keduanya (laki-laki dan perempuan). Biseksual kerap dipandang sebagai salah satu bentuk penyembunyian identitas homoseksual atau sebagai masa transisi antara identitas heteroseksual serta identitas gay dan lesbian.³ Transgender dianggap sebagai kaum yang melanggar norma kultural mengenai bagaimana seharusnya menjadi seorang pria maupun wanita.

Pada abad ke 18 dan 19 beberapa negara mengkatagorikan aktivitas homoseksual merupakan suatu tindakan kriminal dan masuk kejahatan sodomi.⁴ Perilaku homoseksual tidak dapat diterima secara sosial di masyarakat. Situasi ini membuat komunitas homoseksual hidup dan berkembang secara rahasia dan tertutup. Beberapa kelompok kemudian mulai memperjuangkan kaum homoseksual. Orang pertama yang memperjuangkan kaum ini adalah Thomas Cannon pada tahun 1949 di Inggris. Ia menulis tentang gosip dan analogi lelucon yang membela kaum homoseksual. Tetapi Cannon dipenjara akibat tulisannya itu. Sebelumnya, pada tahun

³ Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan, *Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) – Jalan Lain Memahami Hak Minoritas*.

⁴ GAYa Nusantara. *Sejarah Gay, Waria, Lesbian*. Yang diakses melalui www.gayanusantara.or.id. Diakses pada tanggal 14 Februari pukul 22.30 WIB.

1785 seorang filsuf reformis di bidang sosial juga membela kaum homoseksual. Dia adalah Jeremy Bentham. Pemikiran Bentham memberikan inspirasi perubahan aturan hukum terhadap kaum homoseksual mengenai homoseksual bukan suatu tindakan kriminal. Tahun 1791 Perancis menjadi negara pertama yang menerapkan hukum homoseksual bukan termasuk tindakan kriminal.⁵

Kaum feminis dibangkitkan oleh gerakan *free love*. Gerakan ini juga membangkitkan kebebasan hidup dan memperjuangkan kaum homoseksual kepada publik. Gerakan ini memandang sucinya pernikahan membatasi kebebasan hidup dan pilihan. Pada masa lahirnya reformasi di Eropa dan Amerika melahirkan tokoh reformis yang membela hak-hak kaum feminis, kehidupan bebas, dan komunikasi homoseksual. Berbagai gerakan pun mulai berkembang untuk menyuarakan kebebasan hidup. Seperti misalnya gerakan sosial *The Black Power* yang merupakan gerakan untuk memperjuangkan hak kaum berkulit hitam dan *Anti Vietnam War* mempengaruhi komunitas gay untuk lebih terbuka. Masa ini kemudian dikenal sebagai *Gay Liberation Movement* atau gerakan kemerdekaan gay.

Pada masa ini juga terjadi kerusuhan yang dikenal dengan *Stonewall riots*, yaitu keributan sporadis antara polisi dengan para pendemo yang memperjuangkan kebebasan kaum gay. Keributan yang terjadi pada 28 Juni 1969. di Stonewell In, Greenwich Village, Amerika Serikat. Kejadian ini tercatat dalam sejarah sebagai pemicu gerakan perjuangan hak asasi kaum gay di Amerika Serikat dan dunia, sehingga munculah komunitas-komunitas gay baru seperti *Gay Liberation Front (GLF)*, *The Gay Activists' Alliance (GAA)* dan *Front Homoseksual d'Action Revolutionnaire*.

⁵ Sinyo. *Anakku Bertanya Tentang LGBT. Op.Cit.*

Pada tahun 1970 LGBT melakukan aksi protes kepada *American Psychiatric Association* (APA) karena menetapkan homoseksual sebagai bagian dari gangguan jiwa. Banyaknya kaum yang protes akan hal ini membuat APA secara resmi menghapus homoseksual dari masalah *mental disorders* atau gangguan jiwa pada tahun 1974. Setelah itu muncul perbedaan dalam berkarya dan mendapatkan pekerjaan dalam hal identitas gender di masyarakat luas yang memicu munculnya gerakan untuk memperjuangkan hak asasi kaum gay (*Gay Rights Movement*). Tahun 1978 lahirlah *International Lesbian dan Gay Association* (ILGA) di Coventry, Inggris. Institusi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak asasi kaum lesbian dan gay secara internasional. Setelah adanya beberapa gerakan yang menginspirasi hak-hak kaum LGBT, mereka pun membuat simbol sebagai identitas. Simbol LGBT berupa bendera pelangi (*the rainbow flag* atau *pride flag*) sebagai simbol pergerakan hak asasi komunitas LGBT. Awalnya simbol ini hanya untuk melambangkan komunitas gay di Amerika Serikat, namun sekarang di pakai di seluruh dunia sebagai lambang pergerakan kaum LGBT.

Pada tahun 2012, jumlah kaum lesbian, gay, dan biseksual diperkirakan sekitar 3% atau 211,38 juta jiwa dari 7,06 miliar orang di seluruh dunia, sedangkan jumlah keseluruhan transgender diperkirakan sebanyak 15 juta jiwa.⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga reseach di berbagai negara menemukan bahwa:

- Tahun 2007, *Pew Research Center* menyatakan jumlah kaum LGBT di Indonesia sebanyak 3%.
- Tahun 2014, *Canadian Community Health Survey* menyatakan bahwa populasi kaum LGBT di Canada berjumlah 3%.

⁶What is the Population of LGBT People In the World diakses dari <https://www.quora.com> pada 20 Agustus 2017 pukul 00.23

- *Roy Morgan Research* menemukan bahwa 3,4% penduduk Australia merupakan kaum LGBT setelah melakukan penelitian terhadap 180.000 orang dalam rentang waktu antara 2012-2014.
- *Gallup Daily* melakukan penelitian terhadap 120.000 orang di Amerika Serikat pada 1 Juni – 30 September 2012 dan menyatakan bahwa 3,4% diantaranya merupakan kaum LGBT.
- Pada tahun 2009, *University of Sao Paulo* menemukan bahwa kaum LGBT yang berada di Brazil adalah sebanyak 6,3%.
- *Dalia Research* pada Agustus 2016 terhadap 11.754 orang yang tersebar di Eropa menemukan bahwa:

Tabel 3.1

Negara	Jumlah (%)
Jerman	7,4%
Spanyol	6,9%
Inggris	6,5%
Belanda	6,4%
Austria	6,2%
Perancis	5,4%
Polandia	4,9%
Italia	4,8%
Hungaria	1,5%

Sumber: diolah oleh penulis.

Semakin banyaknya populasi kaum ini, membuat mereka semakin kuat untuk melawan segala bentuk diskriminasi. Pada era tahun 1980-an dimulailah gerakan hak asasi kaum gay dan hasilnya yaitu pada 17 Mei 1990 dijadikan sebagai *International Day Againsts Homophobia and Transphobia* (IDAHO). Komunitas LGBT mencari pengesahan hukum pernikahan di negara-negara yang telah melegalkan pernikahan

sesama jenis. Belanda menjadi negara pertama yang melegalkan pernikahan pasangan sesama jenis pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2008 Belgia, Kanada, Norwegia, Afrika Selatan dan Spanyol juga mengikuti jejak Belanda..

B. Negara-Negara Pro LGBT

Semakin sadarnya masyarakat akan hak asasi manusia membuat mereka tidak lagi memperlakukan kaum LGBT menjadi sebuah masalah besar. Beberapa negara di dunia telah melegalkan pernikahan sejenis dan LGBT. Mereka merupakan negara-negara yang menerapkan prinsip hak asasi manusia adalah segalanya yang menjadi keinginan dan harus terpenuhi tanpa adanya paksaan dan diskriminasi. Beberapa negara yang telah pro terhadap LGBT adalah Perancis, Belanda, Denmark, Inggris dan Wales, Skotlandia, Brazil, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, dan Amerika Serikat.

Belanda merupakan salah satu negara yang mendukung atau melegalkan LGBT di negaranya. Berawal dari rezim Nazi yang banyak melakukan diskriminasi hingga tingkat kejahatan pada kaum ini, Belanda berjuang untuk menghentikan tindakan tersebut. Pemerintah Belanda melakukan upaya-upaya baik secara domestik maupun internasional. Pemerintah Belanda memulainya pada Uni Eropa. Belanda berhasil melakukan upaya ini di Uni Eropa dalam mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak kaum LGBT dengan membuktikan beberapa program yang pro terhadap kaum LGBT yang didukung oleh negara-negara Uni Eropa. Belanda juga berhasil meningkatkan penerimaan sosial terhadap LGBT.⁷

⁷ Saskia Keuzenkamp dan David Bos.2007. *Out In The Netherlands: Acceptance of homosexuality in the Netherlands*. Belanda: The Netherlands Institute for Social Research/ SCP.

Pada 18 Mei 2013, Presiden Perancis telah menandatangani undang-undang yang melegalkan pernikahan sejenis yang sekaligus menjadikan Perancis sebagai negara ke-9 di Eropa dan ke-14 di dunia yang pro terhadap LGBT. Denmark juga melakukan hal yang sama ketika pada 15 Juni 2013 telah berlaku hukum yang memperbolehkan pasangan homoseksual untuk melangsungkan pernikahan di gereja *Evangelis Lutheran* yang merupakan gereja milik negara. Selang beberapa hari, yaitu pada tanggal 17 Juli 2013 Ratu Elizabet II melegalkan pernikahan sejenis dan telah disetujui pula oleh kerajaan. RUU ini juga telah mendapatkan persetujuan dari parlemen.⁸

Pada tahun 2014 giliran Skotlandia yang meligalkan pernikahan sejenis dinegaranya setelah melalui voting parlemen. Terdapat sekitar 105 anggota parlemen yang setuju dan menyepakati pernikahan sejenis sebagai langkah penting dalam penyetaraan hak-hak manusia dan hanya 18 orang yang menolak. Pada tahun-tahun terakhir ini banyak negara yang telah menandatangani undang-undang yang meligalkan pernikahan sejenis yang berarti bahwa negara tersebut adalah negara yang mendukung adanya kaum LGBT, diantaranya adalah :⁹

- Brazil: 14 Mei 2013
- Luksemburg: 18 Juni 2014
- Finlandia: 28 November 2014
- Irlandia: 23 Mei 2015
- Amerika Serikat: 26 Juni 2015

⁸ *Ibid.*

⁹ Sindo News.2016. *Daftar Negara Yang Melegalkan Pernikahan Sejenis dan LGBT*, yang diakses melalui <https://lifestyle.sindonews.com>.

Selain negara-negara di Eropa beberapa negara di Asiapun sudah ada yang melegalkan LGBT. Salah satunya adalah Vietnam yang menjadi negara kedua di Asia yang melegalkan pernikahan sejenis. Sebelumnya ada Israel yang sejak 1 Januari 2015 telah menjadi negara pro LGBT.

C. Tokoh-Tokoh LGBT

1. Tokoh-Tokoh LGBT Internasional

a. Elio Di Rupo¹⁰

Elio Di Rupo merupakan Perdana Menteri Belgia dan ketua Partai Sosialis yang lahir pada 18 Juli 1951. Ia adalah pria gay pertama yang memimpin bangsa yang lahir di keluarga imigran katolik Itali. Ia dibesarkan di sebuah keluarga kecil di wilayah Perancis Walonia Belgia. Ayahnya meninggal ketika dia berusia satu tahun dan ibunya adalah seorang buta huruf sehingga tidak dapat mengasuh ketujuh anaknya. Di Rupo dan dua saudaranya di besarkan di sebuah panti asuhan.

Di Rupo memperoleh gelar master dan doktor dalam bidang kimia dari Universitas Mons-Hainaut. Sebagai mahasiswa, ia sudah aktif dalam Partai Sosialis. Karis politiknya di mulai pada tahun 1982 ketika ia menjadi anggota dewan kotamadya di Mons dan kemudian menjabat sebagai wali kota.

Pada tahun 1996, kehidupan pribadi Di Rupo menjadi sorotan akibat skandal seksual dengan laki-laki dibawah umur. Di Rupo pun menanggapi kasus ini dengan tenang dan menyatakan bahwa memang benar dirinya adalah seorang

¹⁰ John Lichfield, "Gay, Socialist, and Born in A Squatters' Camp – Meet The New PM of Belgium," diakses dalam <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/gay-socialist-and-born-in-a-squatters-camp-meet-the-new-pm-of-belgium-6273193.html%3famp>

gay. Baginya masa depan politik tidak akan terhalang dengan adanya gay. Di Rupo membukikanya dengan diangkatnya dia sebagai Presiden dari Partai Sosialis, tiga tahun kemudian. Akibat prestasinya selama menjabat sebagai Perdana Menteri Belgia, Ia berhasil menyelamatkan negaranya dari krisis ekonomi. Pada tahun 2003, dengan dukungan Di Rupo, Belgia menjadi negara kedua yang mengesahkan pernikahan sesama jenis.

b. Waheed Ali¹¹

Waheed Ali merupakan seorang muslim, gay, pengusaha sukses, pejuang hak-hak LGBT dan politikus yang berpengaruh di Inggris. Sejak kecil mengalami diskriminasi ganda, dia sebagai gay dan putra imigran, ibunya seorang perawat yang berasal dari Trinidad sedangkan ayahnya berasal dari Guyana yang beragama islam dan sangat mengecam homoseksual.

Ali mulai berkarir bersama dengan sahabatnya dengan mendirikan Plane 24, sebuah rumah produksi tayangan televisi serta pernah menjadi Direktur Carlton Television Productions. Sebagai seorang milyader sukses di industri media, Ali perlahan tertarik bergabung dengan Partai Buruh. Ali lolos menjadi anggota legislatif yang mewakili dapil Croydon, Ibu Kota London dan menjadi dewan termuda. Ia mengaku tetap menjadi muslim dan sosok politikus yang aktif membela kepentingan LGBT yang dibuktikan dengan mengintervensi beberapa perda yang diskriminatif melarang aktivitas kaum gay.

Berkat perjuangannya, LGBT di Inggris mendapatkan kesetaraan hak. Pada tahun 2000 disamakan batas umur bawah orang dewasa pada homoseksual, yang sebelumnya dibedakan dengan kaum heteroseksual. Pada

¹¹ Kabar LGBT, “Waheed Ali Muslim Gay Pengusaha Sukses Pejuang Hak-Hak LGBT dan Politikus Berpengaruh Di Inggris” diakses dari <https://kabarlgbt.org/2016/02/24/waheed-ali-muslim-gay-pengusaha-sukses-pejuang-hak-hak-lgbt-dan-politikus-berpengaruh-di-inggris/amp/>

tahun 2009, Ia mengusahakan perubahan salah satu klausa dalam Undang-Undang civil Partnership tahun 2004 yang melarang lembaga agama melangsungkan upacara pernikahan sesama jenis. Hal tersebut akhirnya menjadi bagian dalam Undang-Undang Kesetaraan (*Equality Act*) tahun 2010.

Saat ini Ali giat keliling dunia untuk mengajak kaum gay peduli pada masyarakat. Ia juga diangkat sebagai duta persamaan hak LGBT, seperti di Universitas De Montford, di Leicester. Sebelumnya, pada tahun 2008, Ali memenangkan penghargaan Stonewall Award dalam kategori tokoh politik. Pada tahun 2002, ia menjadi seorang penyokong di *The Albert Kennedy Trust*, yang memberikan bantuan dan layanan-layanan khusus pada LGBT muda. Ali juga menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Internasional dengan tema Hak-Hak Asasi LGBT, bagian dari *World Outgames* yang menjadi awal mula Deklarasi Montreal.

2. Tokoh-Tokoh LGBT Indonesia

a. Dede Oetomo¹²

Dede Oetomo lahir pada tanggal 06 Desember 1953 di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau merupakan seorang sosiolog, aktivis AIDS dan aktivis gay di Indonesia. Pada tahun 1978, Dede Oetomo menyelesaikan TESOL dan mendapatkan pendanaan dari Ford Foundation untuk belajar linguistik di Universitas Cornell di Ithaca, New York. Dede Oetomo juga menerima beasiswa dari Dewan Riset Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Science Research Council*) untuk membantunya mengerjakan Thesisnya dari tahun 1983-1984. Kemudian pada tahun 1984-2003 beliau melakukan studi tentang masalah seksualitas,

¹² Kabar LGBT, "Tokoh Dede Oetomo Pejuang LGBT Lebih Dari 3 Dekade" diakses dari <https://kabarlgbt.org/2016/02/12/tokoh-dede-oetomo-pejuang-lgbt-lebih-dari-3-dekade/amp/>

gender dan HIV-AIDS di Indonesia, ia juga mengajar Ilmu Politik di Universitas Airlangga.

Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari Organisasi Gay pertama di Indonesia dan Asia yaitu Lambda Indonesia pada tahun 1982. Pada tahun 1984 Lambda Indonesia bubar, kemudian Dede Oetomo mendirikan organisasi baru yang diberi nama GAYa Nusantara pada tahun 1987. Dede Oetomo juga aktif dalam partai politik yang kemudian diketahui bahwa beliau merupakan bagian dari anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang merupakan Partai Politik pertama di Indonesia yang mencantumkan hak-hak homoseksual dan transeksual.

GAYa Nusantara menjadi sebuah media edukasi seputar masalah seksualitas, gender, kesehatan seksual dengan fokus pada pencegahan HIV. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu seksual dan gender di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini Dede Oetomo merupakan seorang Koordinator Nasional GAYa Nusantara, dan anggota Asia-Pacific Council of AIDS Service Organisations (APCASO) yang aktif dan merupakan sebuah jaringan Organisasi-organisasi komunitas dan non-pemerintahan yang mempunyai misi untuk menyediakan dan memperkuat respon komunitas terhadap HIV, AIDS di wilayah Asia Pasifik.

b. Hartoyo¹³

Hartoyo merupakan seorang aktivis gay yang menjadi anggota dari Organisasi *Ourvoice*. Hartoyo berasal dari keluarga transmigran Jawa di Binjai, Sumatra Utara yang lahir pada 3 Maret 1976. Kemudian pada tahun 1999 beliau

¹³ Madina,” Hartoyo: LGBT dan Islam yang Ramah”, diakses dari www.madinaonline.id/sosok/hartoyo-lgbt-dan-islam-yang-ramah/

pindah ke Banda Unsyiah melanjutkan studinya di Fakultas Pertanian jurusan Produksi Ternak. Semangatnya untuk menjadi aktivis dan pejuang hak-hak LGBT lahir akibat penghinaan dan kekerasan fisik yang dialaminya.

Pada 21 Januari 2007 dia dengan teman prianya disiksa secara biadab oleh aparat keamanan . Polisi Aceh menangkap mereka karena mereka gay. Sebelum dibawa kekantor polisi, Hartoyo dengan teman prianya di siksa, dihina, dimaki, dipukuli, dan ditelanjangi di depan orang banyak. Ketika dibawa ke kantor polisi, Hartoyo merasa lega dan berharap mendapatkan perlindungan, tetapi justru mendapatkan siksaan yang lebih kejam. Hartoyo yang tidak terima dengan perlakuan tersebut kemudian melaporkan kekerasan yang dia terima ke Komnas HAM, namun perjuangannya untuk memperoleh keadilan tidak mudah.

Sebelum mendapatkan diskriminasi di Aceh, Hartoyo pernah bergabung dengan LSM Heifer Indonesia tahun 2002 di Medan. Selama tahun 2002 hingga 2006 bergabung dengan Heifer, Hartoyo bekerja untuk isu-isu pertanian di Medan. Kegiatan ini membawanya berhubungan langsung dengan isu gender, feminisme, dan pluralisme. Ia belajar bahwa dunia pertanian penuh dengan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan minoritas. Dari sinilah Ia mengenal Islam Liberal, yang memperkenalkannya pada pemikiran Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, Abdul Munir Mul Khan, dan lain-lain. Ia juga mulai mengenal aktivis Islam liberal seperti Adshar Abdalla, Luhfie Assyaukanie, Guntur Romli dan Novriantoni Kahar yang kemudian dianggapnya sebagai pada aktivis yang berjasa mengenalkannya pada islam yang ramah, yang memberikan ruang kebebasan untuk berfikir kritis dan berpendapat.

Dorongan kuat dari para aktivis perempuan yang telah lama memperjuangkan persaan gender dan pengalaman pahitnya menjadi salah satu didirikanya LSM LGBT *Ourvoice*, yang menjadikan dirinya sendiri sebagai ketuanya. Dengan organisasi ini, Hartoyo ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang LBGT adalah kodrat yang perlu dilindungi dan jika ada pihak yang tidak menyetujuinya, tidak perlu diluapkan dalam bentuk kekerasan atau bentuk-bentuk yang tidak manusiawi. Hartoyo sering aktif mengikuti kegiatan diskusi-diskusi filsafat Islam Liberal yang kemudian memberikan pemahaman tentang pluralisme yang dijadikan modal besar terhadap pemikirannya untuk mengembangkan LSM *Ourvoice*.

c. Vinolia Wakijo¹⁴

Vinolia Wakijo lahir di Yogyakarta pada 9 Mei 1958. Beliau mengenyam pendidikan informal tentang pengalaman empirik terkait isu gender dan seksualias, Kesehatan Reproduksi, HIV AIDS, dan kesehatan masyarakat. Beliau merupakan pendiri yayasan Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya) yang menjadi rumah aman bagi waria dengan HIV/AIDS. Kebaya berada di Jl. Gowongan Lor III/148 Yogyakarta ini merupakan sebuah LSM yang menangani waria, khususnya bagi para waria yang terkena HIV/AIDS.

Pada tahun 1993 hingga tahun 2005 beliau sudah aktif sebagai aktivis HIV dan menjadi relawan di PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) DIY. Kemudian beliau fokus pada HIV yang diderita oleh waria karena pada saat itu prevalensi HIV di kalangan waria sangat tinggi, bahkan menyebabkan beberapa waria meninggal dalam kurun waktu 1 bulan.

¹⁴ Merry Wahyuningsih, "*Kebaya, Rumahnya Waria dengan HIV/AIDS*," diakses dalam www.detik.com/health/read/2011/10/24/094318/1750714/775/kebaya-rumahnya-waria-dengan-hiv-aids

Kemudian beliau mundur dari PKBI. Saat itu beliau hanya aktif menangani ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) tanpa apa lembaga khusus atau bantuan dana.

Pada tahun 2006, Vinolia Wakijo akhirnya mendapatkan bantuan dari UNAIDS (*United Nations Programme on HIV/AIDS*) untuk membuat sebuah lembaga sosial dan mendapatkan bantuan dana. Setelah 1 tahun kontrak dengan UNAIDS habis, Kebaya sempat bekerjasama dengan Hivos Foundation selama 9 bulan yang kemudian berlanjut kerjasamanya dengan Global Fund. Terhitung hingga bulan Maret 2010, Kebaya telah bekerjasama dengan tiga lembaga pendanaan. Selain melakukan perawatan bagi ODHA waria, Kebaya juga memiliki pertemuan rutin dengan 8 titik komunitas dan *close meeting* dengan ODHA. Selain mendapatkan bantuan dari lembaga dana, Kebaya juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Yogyakarta.

Yayasan Kebaya juga bekerjasama dengan gereja, NU dan beberapa kampus di Yogyakarta seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Gajah Mada (UGM) dalam bentuk memberi informasi dan workshop. Menurut Vinolia Wakijo, masalah bagi para waria adalah bagaimana membangun mental, karena mental mereka sudah mengakar di jalanan. Menurutnya, risiko penularan HIV/AIDS di kalangan waria sangatlah tinggi, terutama melalui hubungan seksual. Beliau berharap bagi ODHA waria dan para waria pada umumnya untuk rutin melakukan tes VCT, hidup sehat, mengutamakan kondom dan memperbanyak informasi mengenai HIV/AIDS.

D. Badan Pendanaan LGBT

Pendanaan untuk program LGBT di seluruh dunia dilakukan oleh organisasi maupun yayasan yang berbasis pada pendanaan atau funding. Organisasi tersebut melakukan pendanaan akibat semakin adanya ketertarikan terhadap isu-isu advokasi LGBT, Hak Asasi Manusia, hingga pernikahan sesama jenis. Hal tersebut terbukti pada tahun 2012, organisasi atau yayasan Amerika Serikat memberikan lebih dari \$120.000.000 untuk mendukung isu-isu mengenai LGBT di seluruh dunia.¹⁵ Sebelumnya, pada tahun 2010 organisasi LGBT menerima 713 grants atau total U\$35.467.361 dari 64 international funders.¹⁶ Angka tersebut diperkirakan akan semakin meningkat mengingat semakin beragamnya isu-isu seputar LGBT. Yayasan pemberi dana tersebut kebanyakan berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Finlandia, dan UK.

Adapun beberapa organisasi, yayasan dan kelompok kepentingan yang terlibat dalam pendanaan LGBT diantaranya adalah Hivos (Belanda), Ford Foundation (US), Horizon Foundation (US), Arcus Foundation (US), Astrea Lesbian Foundation for Justice (US), CBD Charitable Trust (UK), dan Dreilinden gGmbH (Denmark).

1. *Humanistic Institute for Development Cooperation (Hivos)* ¹⁷

Hivos merupakan organisasi internasional yang mendukung perubahan sosial, kebebasan berekspresi, demokrasi, dan *green entrepreneurship worldwide*. Sebuah organisasi pendanaan nonpemerintah yang berasal dari Belanda yang didirikan pada tahun 1968. Program-program sosial yang dilakukan Hivos diantaranya adalah kelanjutan pangan (*sustainable food*), pembaharuan energi, transparansi dan akuntabilitas, kebebasan berekspresi, hak seksual dan perbedaan, dan pemberdayaan perempuan.

¹⁵ Robin Toal, "20 Foundations and Trusts that fund LGBT Programs," diakses dalam <https://www.fundforngos.org/foundation-funds-for-ngos/20-foundations-trusts-fund-lgbt-programs/>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hivos, "About Hivos" diakses melalui <https://www.hivos.org>

Dalam program *sexual rights and diversity*, Hivos juga turut menyoroti isu tentang LGBT. Hivos memiliki catatan panjang dalam mendukung gerakan LGBT yang dipenuhi dengan diskriminasi menjadi gerakan yang kuat di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Pada Januari 2016, Hivos terlibat dalam pendanaan jangka pendek dalam acara *gathering* kaum LGBT di Indonesia. Bahkan pendanaan paling luas untuk acara tersebut berasal dari organisasi ini.

Dimulai pada tahun 2003, pendanaan bersumber dari pemerintah Belanda. Kemudian, Ford Foundation bergabung dengan Hivos dalam menyediakan sumber pendanaan bagi organisasi-organisasi LGBT. Organisasi ini, mengarahkan penggunaan dananya pada advokasi LGBT dan hak asasi manusia dari pada penanggulangan HIV sebagaimana fokus tradisional dari badan pemberi dana lainnya.

2. Ford Foundation¹⁸

Ford Foundation merupakan sebuah organisasi swasta yang didirikan di Michigan dan berpusat di kota New York yang bertujuan untuk mendanai program-program yang diprakarsai oleh Edsel Ford dan Henry Ford pada tahun 1936.

Tahun 2008, Ford foundation memiliki jumlah aset hingga mencapai US\$ 13,7 miliar dan US\$ 530 juta disalurkan dalam bentuk hibah untuk proyek yang berfokus pada nilai demokrasi, pengembangan komunitas dan ekonomi, pendidikan, media, seni dan budaya, serta hak asasi manusia. Organisasi ini bergabung dengan Hivos untuk menyediakan sumber pendanaan bagi organisasi-organisasi LGBT. Ford akan terus mengalokasikan dana hibah yang

¹⁸ Ford Foundation, "About" diakses dari <https://fordfoundation.org>

lebih besar untuk memajukan hak LGBT. Beberapa tahun terakhir ini diketahui bahwa rata-rata hibah untuk LGBT telah mencapai \$230.000.

3. Arcus Foundation¹⁹

Arcus Foundation merupakan sebuah yayasan global yang sangat terkemuka yang didedikasikan untuk kehidupan yang harmoni antara satu sama lain dan alam. Arcus bekerja dengan para ahli untuk memastikan bahwa kaum LGBT berkembang sebagaimana manusia pada umumnya dimana memperoleh keadilan sosial yang sama tanpa adanya perbedaan. Yayasan ini berbasis di New York, Amerika Serikat dan Cambridge, Inggris dan bekerja secara global dengan komitmen memperjuangkan hak asasi manusia.

Pada tahun 2015, Arcus memberikan lebih dari \$18 juta kepada organisasi-organisasi yang bekerja untuk keadilan sosial bagi kaum LGBT. Tujuan utamaprogram keadilan sosial adalah untuk memastikan bahwa individu, ras, etnis, setiap orientasi seksual dan identitas gender mampu menjalani kehidupan mereka dengan bermartabat dan hormat serta dapat menunjukkan cinta dan jati dirinya tanpa adanya diskriminasi.

Saat ini Arcus sedang mengembangkan program *Arcu's Global Religions Program* yang mendukung LGBT, organisasi berbasis iman dan merupakan yang bekerja dalam lingkup nasional, multinasional dan internasional. Untuk mendukung pada pemberi hibah agar dapat memberikan hibahnya, Arcus memprioritaskan program ini sebagai berikut:

- Memperkuat dan meningkatkan tenaga terdidik, pemimpin agama dan aktivis advokasi untuk dapat mengobati dan melindungi kaum LGBT

¹⁹ Arcus Foundation, "About" diakses dari www.arcusfoundation.org/what-we-support/

muslim, artinya tidak ada diskriminasi melainkan diberikan pengarahan sesuai dengan norma islam seadil adilnya

- Memobilisasi pemimpin kepercayaan moderat dan progresif di negara-negara utama
- Memperkuat upaya antara agama untuk menjamin kebijakan yang adil terhadap kaum LGBT

Selain dari ketiga organisasi – organisasi tersebut, masih ada beberapa lembaga dan organisasi yang telah terang-terangan memberikan dana untuk kaum LGBT. Contohnya adalah dana sebesar Rp 107,8 Miliar yang diberikan untuk LGBT Indonesia dan tiga negara Asia.²⁰ Dana tersebut berasal dari kemitraan regional antara UNDP, kedutaan besar Swedia di Bangkok dan USAID.

Proyek UNDP ini mendanai komunitas LGBT Indonesia, China, Filipina dan Bangkok. Tujuan dari proyek ini adalah mendukung hak-hak LGBTI melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hingga mengatasi stigma, diskriminasi dan mengakhiri praktik-praktik berbahaya termasuk pelanggaran HAM terhadap individu LGBTI melalui mobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam dialog dengan stakeholder (organisasi keagamaan, sektor swasta, aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan).

E. LGBT dan Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)

Semua manusia terlahir dengan derajat dan hak yang setara satu sama lain. Hak Asasi Manusia sejatinya bersifat *universal*, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan

²⁰ Sindo News. “Dana Melimpah Rp. 1,078 Miliar Untuk LGBT Indonesia dan 3 Negara Asia” diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1084674/40/dana-melimpah-rp1078-miliar-untuk-lgbt-indonesia-3-negara-asia-1455237677>

dan saling terkait.²¹ Begitu halnya dengan *Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Orientasi Seksual dan Identitas Gender juga tidak bisa semata-mata dijadikan sebagai alasan atas berbagai tindakan diskriminasi maupun kekerasan.

Sexual Orientation atau Orientasi Seksual dapat dipahami sebagai acuan terhadap kapasitas seseorang untuk memunculkan ketertarikan emosional, seksual dan perasaan kepada orang lain, serta hubungan intim dan seksual dengan orang lain dengan jenis kelamin berbeda, sama, atau lebih dari satu jenis kelamin.²²

Sedangkan *Gender Identity* atau Identitas Gender mengacu pada perasaan pengalaman internal dan individu terhadap gender, yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan, termasuk perasaannya pada bagian tubuhnya (yang mungkin mencakup, jika dipilih secara bebas, perubahan bentuk tubuhnya melalui cara medis, pembedahan atau cara lainnya) dan cara lain dalam mengekspresikan gender, termasuk cara berpakaian, berbicara dan bersopan santun.²³

Istilah *Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)* seolah tidak bisa dilepaskan dari kaum LGBT. Hal tersebut memang benar apa adanya mengingat SOGI merupakan hak kaum LGBT yang sangat diperjuangkan demi mendapat pengakuan. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh kaum LGBT maupun kelompok yang peduli terhadap mereka untuk memperkenalkan SOGI. Istilah SOGI tumbuh seiring dengan semakin gencarnya para kaum LGBT untuk menuntut haknya tersebut, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan pemikiran masyarakat awam.

Kaum LGBT sering mendapatkan tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang didasarkan pada SOGI. Kebanyakan masyarakat masih menganggap mereka

²¹ Ardhanary Institute. "*Latar Belakang: Tentang Prinsip-Prinsip Yogyakarta*", *Op. Cit.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

sebagai sebuah penyimpangan karena berbeda dari apa yang seharusnya. Pelaku tindakan diskriminasi dan kekerasan belum paham mengenai apa yang mereka lakukan juga merupakan sebuah Hak Asasi Manusia akibat dari kurangnya pengenalan akan SOGI tersebut.

Banyaknya tindakan diskriminasi dan kekerasan yang muncul terhadap kaum LGBT membuat dunia perlahan-lahan menaruh perhatian terhadap fenomena tersebut. Organisasi-organisasi maupun individu dan bahkan negara mulai menyusun cara agar tindakan tersebut dapat berkurang. Ada yang mengkampanyekannya secara langsung tapi ada juga yang bekerjasama untuk kemudian memsosialisasikannya kepada masyarakat luas. Caranya pun sangat beragam, ada yang dengan cara konvensional seperti kampanye dan sosialisasi, namun ada juga yang menggunakan media-media lain yang lebih menarik sehingga dengan begitu diharapkan masyarakat akan tertarik untuk mendengarkan sekaligus memahaminya.

Salah satu media baru yang digunakan dalam memperkenalkan SOGI adalah dengan menggunakan komik. Sebuah komik telah dibuat dengan mengambil tema SOGI. Pembuatan komik dengan tema SOGI tersebut diharapkan dapat mempermudah pemahaman masyarakat terhadap SOGI itu sendiri. Komik tersebut diberi nama *Komik Yogyakarta Principles*. Komik tersebut memang mengambil tema SOGI yang juga merupakan pokok bahasan dari *Yogyakarta Principles*. Prinsip-Prinsip Yogyakarta atau *Yogyakarta Principles* merupakan sebuah dokumen tentang pengaplikasian *Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)*. Dokumen tersebut merupakan bukti nyata atas semakin bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap kaum LGBT khususnya SOGI.

Selain pengenalan kepada masyarakat, kaum, aktivis, maupun organisasi LGBT terus mengupayakan SOGI untuk dapat dijadikan sebagai salah satu Hak Asasi

Manusia yang harus dihormati keberadaannya. Mereka yang peduli membawa isu SOGI tersebut kedalam panel yang lebih tinggi lagi (PBB) sehingga dapat diterapkan secara global. Selain itu tujuan membawa SOGI ke dalam panel PBB adalah untuk mendapatkan pengakuan yang sah serta mendapatkan posisi hukum yang jelas sehingga tindakan diskriminasi maupun kekerasan bisa ditekan.

Akhirnya pada 30 Juni 2016, *Human Rights Council (HRC)* memutuskan untuk membangun sebuah tim ahli dalam “*Protection Against Violence and Discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity*” atau Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.²⁴ Pembentukan tim ahli independent yang berdasarkan pada *UN Special Procedure* tersebut adalah untuk memastikan kelanjutan dan perhatian dari badan induk PBB untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia atas dasar orientasi seksual dan identitas gender serta memperkuat kenyataan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut harus diperlakukan dengan keseriusan dibawah hukum internasional.²⁵

F. Yogyakarta Principles dalam Penerapan Hukum HAM Internasional Berdasarkan Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)

Yogyakarta Principles atau Prinsip-Prinsip Yogyakarta merupakan sebuah tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender.²⁶ Kerangka *Yogyakarta Principles* sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 2005 yang diprakarsai oleh sekumpulan

²⁴ ILGA. “*Compilation of the Adoption of the 2016 SOGI Resolution*”, diakses dari http://ilga.org/downloads/SOGI_Resolution_Vote_compilation.pdf pada 22 Maret 2017.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ardhanary Institute. “*Latar Belakang: Tentang Prinsip-Prinsip Yogyakarta*”, *Op. Cit.*

NGO dalam bidang Hak Asasi Manusia dan kemudian difasilitasi oleh *International Service for Human Rights* dan *International Commission of Jurist*.²⁷

Prinsip-prinsip tersebut diusulkan untuk mempunyai tiga fungsi utama.²⁸ *Pertama*, melakukan pemetaan terhadap pengalaman mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh orang-orang dari beragam orientasi seksual dan identitas gender. *Kedua*, mengaplikasikan pengalaman berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia internasional yang diartikulasikan secara jelas dan setepat mungkin. *Ketiga*, prinsip-prinsip harus mengeja secara rinci kewajiban asli dari negara untuk penerapan yang efektif dari masing-masing kewajiban Hak Asasi Manusia.

Sebanyak 29 orang ahli HAM yang tersebar dalam 25 negara dan berasal dari berbagai latar belakang diundang untuk menyusun prinsip-prinsip tersebut. Mereka termasuk seorang mantan anggota *UN High Commissioner for Human Rights*, 13 yang masih menjabat maupun mantan anggota *UN Human Rights Special Mechanism Office Holder* atau *Treaty Body*, dua sebagai hakim pengadilan domestik, dan beberapa akademisi dan aktivis. Sebanyak 17 diantara para ahli tersebut adalah perempuan.²⁹

Proses penyusunan dilakukan selama beberapa bulan antara tahun 2006 hingga 2007 mengingat banyak pandangan yang harus dijadikan satu kesatuan sehingga prinsip tersebut menghasilkan sebuah teks atau dokumen yang tepat. Penyusunan tersebut dilakukan melalui komunikasi elektronik sebelum akhirnya banyak ahli yang bertemu dalam sebuah seminar internasional yang bertempat di Yogyakarta, Indonesia pada 6-9 Nopember 2006.³⁰ Seminar tersebut diadakan dengan maksud untuk meninjau sekaligus menyelesaikan teks atau dokumen yang telah disepakati oleh konsensus.

²⁷ Michael O'Flaherty dan John Fisher. "*Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles.*" , *Op. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Michael O'Flaherty dan John Fisher. "*Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles.*" *Op. Cit.*

Jumlah total prinsip-prinsip yang telah disusun adalah sebanyak 29 prinsip yang terdiri atas beberapa urutan, yaitu prinsip 1-3 menetapkan prinsip-prinsip universal HAM dan pengaplikasiannya untuk semua orang tanpa diskriminasi. Prinsip 4-11 mengenai hak-hak dasar kehidupan, kebebasan dari kekerasan dan penyiksaan, privasi, akses kepada keadilan dan kebebasan dari penahanan yang sewenang-wenang. Prinsip 12-18 mengenai pentingnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pekerjaan, akomodasi, jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Prinsip 19-21 menekankan kepentingan kebebasan untuk mengekspresikan diri, identitas dan seksualitas seseorang tanpa campur tangan negara berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan publik dan sebaliknya bergabung dalam kelompok dengan yang lainnya.

Prinsip 22 dan 23 menyoroti hak untuk mencari suaka dari tindakan penganiayaan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip 24-26 menekankan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, urusan publik, dan kehidupan budaya komunitas mereka tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip 27 mengakui hak untuk mempertahankan dan mempromosikan HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, dan kewajiban negara untuk memastikan perlindungan pembela HAM yang bekerja dalam bidang ini. Prinsip 28 dan 29 menegaskan pentingnya memegang pelanggar hak-hak yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa mendapatkan ganti rugi untuk mereka yang menghadapi pelanggaran HAM.

Prinsip-prinsip tersebut mencakup besarnya kisaran standar Hak Asasi Manusia (HAM) dan penerapannya dalam isu orientasi seksual dan identitas gender serta menegaskan kewajiban utama negara untuk mengimplementasikan HAM. Setiap prinsip juga dilengkapi dengan saran atau rekomendasi terperinci bagi negara. Bukan

hanya negara yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk memajukan dan melindungi HAM, namun prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kewajiban tersebut berlaku untuk semua orang.

